

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Suporter Bola

A.1. Pengertian Suporter Bola

Suporter di Indonesia sedang berada dalam periode bertumbuh. Dalam lima tahun terakhir ini, muncul kelompok-kelompok suporter terorganisir. Suatu fenomena yang berdampak amat positif bagi perkembangan sepak bola nasional. Kehadiran kelompok suporter ini sedikit banyak merubah gaya dukung dan pola perilaku penonton di lapangan. Secara keseluruhan, berdampak pada industri sepak bola nasional yang lebih semarak dan berwarna.

Suporter bola adalah orang yang memberikan dukungan yang bersifat aktif. Di sepakbola, supporter memberikan dukungannya dilandasi dengan rasa cinta dan fanatisme pada tim. Suporter bola dengan supporter olahraga lainnya sangatlah berbeda, perbedaan itu dapat terlihat dari begitu banyaknya supporter. Mereka memiliki fanatisme yang sangat tinggi bahkan sampai berlebihan dan cenderung kelewatan batas.¹⁰

Dari kutipan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa supporter merupakan sekumpulan orang yang memberikan dukungan kepada salah satu grup sepak bola yang dimana mereka memiliki kepedulian tinggi terhadap grup sepak bola yang mereka dukung. Suporterlah yang membuat ramai suatu pertandingan. Bahkan suporterlah yang menghidupkan sepak bola itu sendiri. Suporter yang cerdas adalah supporter sportif, tidak anarkis, tidak lugu, punya pengetahuan dan kepedulian terhadap timnya.

¹⁰ Anantha Putra Perdana. 2014. Upaya Polisi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Oleh Suporter Sepakbola Di DIY. Fakultas Hukum. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hal. 8.

Indonesia sendiri masuk sebagai suporter fanatisme terbesar di dunia, dibuktikan dengan rata-rata yang datang ke stadion membela tim kebanggaan berlaga. barisan suporter berbasis besar di Indonesia dimiliki oleh arema, Persija, Persib, Persegres dan lain-lain hampir semuanya, namun mereka terkadang kerap bentrok dan menimbulkan aksi tidak terpuji anarkisme hingga berujung tumbal nyawa.

Seperti contoh kasus bentrokan yang terjadi antara supporter persegres melawan supporter PS TNI pada pertandingan kejuaraan sepakbola Torabika (TSC) antara Persegres vs PS TNI di Stadion Tri Dharma pada hari, Minggu tanggal 22 Mei 2016 yang mengakibatkan sedikitnya 51 suporter ultras dilarikan ke Rumah Sakit, korban tersebut dari supporter PERSEGRES, dan semuanya dilarikan ke RS Ibnu Sina dan RS Semen Gresik.¹¹

B. Tindak Pidana

B.1. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dalam pidatonya di Dies Natalis Universitas Gajahmada tanggal 19 Desember 1995 dengan judul “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana”, mengatakan “Tidak terdapatnya istilah yang sama didalam menterjemahkan *Strafbaar Feit* di Indonesia”.¹²

Dari kutipan diatas tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana untuk hukumannya berupa ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu

¹¹ Kronologi kerusuhan supporter laga persegres vs PS TNI, <http://www.tribunnews.com/superskor/2016/05/23/kronologi-kerusuhan-suporter-laga-persegres-vs-ps-tni>, diakses 12 juni 2017

¹² Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Penerbit Bineka Cipta 2000, hal. 54,55.

sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹³

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Menurut Moeljatno, ini ada 4 istilah yang dipergunakan dalam Bahasa Indonesia, yakni :

1. Peristiwa pidana (pasal 14 ayat (1) UUDS 1950)
2. Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum UU no.1 tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil, pasal 5 ayat (5) UU darurat tentang mengubah ordonasi *Tijdelijk Bilzondere Bepalingen Strafecht*. L.N 1951 no. 78 dan dalam buku Mr. Karni : tentang ringkasan Hukum Pidana

¹³ Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 22

3. Tindak pidana (UU no.7 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan DPR).
4. Pelanggaran pidana dalam buku Mr. Tirtaamidaja : Pokok-pokok hukum pidana 1955.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.

B.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana itu menurut Lamintang pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni: unsur-unsur Subyektif dan unsur-unsur Obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur Subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.¹⁴

Dari kutipan diatas suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Didalam tindak pidana terdapat dua unsur yakni, unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Unsur-unsur subyektif yaitu Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan

¹⁴ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, sedangkan unsur-unsur subyektif yaitu yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif

B.3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

A. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

B. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

C. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja

(culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

D. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).¹⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

B.4. Subyek Tindak Pidana

Sebagaimana diuraikan terdahulu, bahwa unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia. Ini dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Rumusan delik dalam UU lazim dimulai dengan kata-kata "*Barang siapa yang...*" . kata tersebut dapat diartikan sebagai "orang"
2. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana, yaitu :
 - a. Pidana pokok :
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda, yang dapat diganti dengan pidana kurungan

¹⁵ Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. 1993. Jakarta Hlm. 69

- b. Pidana tambahan :
 - 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2. Perampasan barang-barang tertentu
 - 3. Diumumkannya keputusan hakim
- c. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggung jawabkan itu adalah manusia.
- d. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap dalam batin manusia.¹⁶

Dari kutipan diatas subyek hukum adalah manusia atau orang, dapat disimpulkan cara merumuskan tindak pidana yang hampir selalu dimulai dengan “barang siapa”. Siapa disini menunjuk orang, pidana yang diancam dan dibutuhkan terhadap pelaku delik yaitu pidana pokok tambahan

C. Tindak Pidana Penganiayaan

C.1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi Bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

M. H. Tirtamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹⁷

¹⁶ Moeljatno. 1993. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta.hlm. 7

¹⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hal 5.

Dalam teori diatas yang disebut Tindak Pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum didalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”. tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian bila kita lihat dari unsur kesalahannya, dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (mishandeling), yang dimuat dalam BAB XX Buku II, pasal 351 s/d 356.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan, diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.¹⁸
2. Menurut M.H Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka kepada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan itu untuk menambah keselamatan badan.¹⁹
3. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

C.2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi , Teori-teori dan kebijakan pidana, penerbit alumni Bandung 1984, Hal. 30.

¹⁹ Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta Fasco, 1955, Hal. 174.

Dalam KUHP tindak pidana penganiayaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut :

C.2.1 Tindak pidana penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.²⁰

Didalam pasal 351 KUHP ada 4 jenis penganiayaan biasa, diantaranya :

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 rupiah. (ayat 1)
 - 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2)
 - 3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. (ayat 3)
 - 4) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4)
- a. Unsur-unsur penganiayaan biasa yaitu :
- 1) Adanya kesengajaan
 - 2) Adanya perbuatan
 - 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
 - 4) Akibat yang menjadi satu-satunya.²¹

Dari kutipan diatas tindak pidana penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 300. Penganiayaan biasa ini diatur dalam pasal 351 yaitu pada hakikatnya

²⁰ Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh, (Jakarta: Sinar Grafika) 2000, hal.50

²¹ Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh, (Jakarta: Sinar Grafika) 2000, hal.50

semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

C.2.2. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Tindak pidana ini diatur dalam pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini diancam dengan maksimum hukuman penjara 3 bulan atau denda 300 rupiah. Hukuman ini biasa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah. Penganiayaan tersebut dalam pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

- a. Unsur-unsur penganiayaan ringan :
- a) Bukan berupa penganiayaan biasa
 - b) Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya, pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah, dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
 - c) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian.²²

Berdasarkan kutipan diatas tindak pidana penganiayaan ringan ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan dan biasanya penganiayaan ini dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau orang yang ada dibawah perintah.

C.2.3. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana

²² Leden Marpang, Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta 2002, Hal. 5

Menurut .M.H Tirtaamidjaja, mengutarakan arti direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang”. Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkret dari setiap peristiwa.²³

Dari teori diatas tindak pidana penganiayaan berencana yaitu penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu yang artinya bahwa ada suatu jangka waktu berapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan ini tidak memerlukan waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan.

Tindak pidana ini diatur dalam pasal 353 KUHP, ada 3 macam penganiayaan berencana yaitu :

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 tahun.

²³ M.H Tirtaamidjaja, 1995, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Fasco. Jakarta, Hal.

Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana terlebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung pada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

a. Unsur-unsur penganiayaan berencana

- a) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- b) Sejak timbulnya kehendak atau pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir tentang resiko yang akan ditanggung, bagaimana cara dan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya, bagaimana cara menghilangkan jejak.
- c) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukannya dengan suasana hati yang tenang.

C.2.4. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tindak pidana ini diatur dalam pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, yaitu : kesalahan (kesengajaan), perbuatannya (melukai secara berat), objeknya (tubuh orang lain), akibatnya (luka berat).²⁴

²⁴ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2), Jakarta, 2011, Hal.6

Dari kutipan diatas tindak pidana penganiayaan berat dilakukan dengan sengaja dan dapat menimbulkan luka berat kepada korban. Yang dimaksud luka berat ini yaitu luka yang tidak bisa sembuh lagi dengan sempurna, tidak dapat memakai salah satu panca indra, cacat besar, lumpuh.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, maupun terhadap akibatnya yakni luka berat. Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut :

- 1) Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- 2) Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- 3) Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera.
- 4) Mendapat cacat besar.
- 5) Lumpuh (kelumpuhan).
- 6) Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari 4 minggu.
- 7) Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.²⁵

C.2.5. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.²⁶

Jika kita lihat dari penjelasan diatas tentang kejahatan yang berupa

penganiayaan berencana dan penganiayaan berat maka penganiayaan

²⁵ Ibid, hlm 47

²⁶ Ardiansyah, 2014, Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan dan Pembunuhan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Hal. 35

berta berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (354 ayat 1) dengan penganiayaan berencana (353 ayat 1), dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak atau bersama.

D. Penegakan Hukum

D.1. Latar Belakang Penegakan Hukum

Hukum bekerja dengan cara memancang perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan yang demikian itu maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya, yaitu

1. Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang
2. Penyelesaian sengketa-sengketa
3. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat.²⁷

Pada abad ke-19 penegakan hukum (*Rule Of Law*) mulai muncul sebagai suatu doktrin hukum, bersamaan dengan lahirnya Negara demokrasi dan konstitusi. Ia lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan Negara dan sebagai reaksi terhadap Negara absolute yang berkembang selanjutnya. *Rule Of Law* merupakan konsep tentang *common law* dimana segenap lapisan masyarakat dan Negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan dan egalitarian.²⁸

Dari kutipan di atas Rule Of Law adalah Rule by the Law bukan Rule by the Man, ia lahir sebagai suatu doktrin hukum, bersamaan dengan lahirnya

²⁷ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, 1979, Hal. 127

²⁸ Sanyoto, Penegakan Hukum di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Hal. 2

Negara demokrasi dan konstitusi. Ada tidaknya Rule of Law dalam suatu Negara ditentukan oleh “kenyataan” apakah rakyatnya benar-benar menikmati keadilan, dalam arti perlakuan yang adil, baik sesama warga Negara maupun dari pemerintah. Oleh karena itu pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang berlaku disuatu Negara merupakan suatu premise bahwa kaidah-kaidah yang dilaksanakan itu merupakan hukum yang adil, artinya kaidah-kaidah hukum yang menjamin perlakuan yang adil bagi masyarakat.

D.2. Pengertian Dan Lingkup Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Penegakan Hukum dapat dilakukan oleh subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum adalah manusia-manusia yang terlibat dalam upaya berfungsinya hukum sebagai mestinya, sedangkan penegakan hukum dari objeknya adalah proses penegakan hukum yang ditinjau dari aspek kepatuhan terhadap aturan hukum itu sendiri atau kepatuhan kepada keadilan.²⁹

Berdasarkan kutipan diatas penegakan hukum bisa diartikan sebagai suatu upaya untuk menegakan hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.

Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek dalam arti yang luas dan dapat pula diartikan oleh subjek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan hukum.

²⁹ Hikmahanto Juwono, Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development, Jakarta, Varia Peradilan, Hal. 13

Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan paksaan.

D.4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁰

Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime) Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu

³⁰ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of noenforcement.

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.³¹

D.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses social, yang tidak bersifat tertutup tetapi bersifat terbuka dimana banyak yang mempengaruhinya. Keberhasilan penegakan hukum akan sangat dipengaruhi oleh berbagai factor, adapun beberapa factor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :

1. Substansi Hukum, hukum diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, sebagai contoh UU dibuat oleh DPR, dalam menciptakan substansi atau isi hukum tersebut DPR sebagai lembaga yang diberi wewenang harus memperhatikan apakah isi dari UU itu betul-betul akan memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat atau justru dibuatnya hukum yang akan semakin membuat ketidakadilan dan ketidak pastian dan malah merugikan masyarakat. Maka untuk itu substansi hukum sangat penting sekali.

2. Struktur hukum, struktur hukum ini dimaknai para pelaku penegak hukum, sebagaimana yang disampaikan oleh penegak hukum ada 2 yaitu penegak hukum yang pro yustitia dan penegak hukum yang non pro yustitia, penegak hukum pro yustitia adalah hakim, jaksa, polisi, dan advokat, sedangkan yang non pro yustitia adalah seperti halnya dilingkungan bea cukai, perpajakan, lembaga pemasyarakatan. Para penegak hukum ini memegang peranan yang sangat penting ditangan

³¹ Ibid hlm 37

mereka hukum ditegakkan, mereka harus memiliki komitmen moral yang sangat kuat dalam penegakan hukum.

3. Faktor sarana dan prasarana, penegakan hukum membutuhkan sarana dan prasarana seperti bagi polisi peralatan yang memadai dan tentunya bisa dilakukan, sarana dan prasarana ini tentu berkaitan dengan anggaran, maka anggaran untuk penunjang benar-benar di manfaatkan untuk itu.

4. Faktor masyarakat, masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi juga di dalam efektifitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau patuh hukum maka tidak ada ke efektifitas. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.³²

5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Ke lima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya karena faktor-faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

D.4. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Sebagai Penegak Hukum

D.4.1. Pengertian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra

³² Hafid Zakaria SH, MH, Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, Jambi, 2013

polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.³³

Berdasarkan kutipan diatas polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka

³³ Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 5.

diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi.

Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

D.4.2. Tugas dan Wewenang

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan ;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan ;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan ;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional ;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum ;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa ;
7. Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya ;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian ;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menunjang tinggi hak asasi manusia ;

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak-pihak yang berwenang ;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian ; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.³⁴

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati dan di hormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh undang-undang polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain :

1. Menerima laporan dan atau pengaduan ;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum ;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa ;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian ;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan ;
7. Melakukuan tindakan pertama di tempat kejadian ;
8. Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang
9. Mencari keterangan dan barang bukti ;
10. Menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional ;
11. Mengeluarkan surat izin dan atau surat-surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat ;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.³⁵

³⁴ Herzien inlandsch reglement (H.I.R), Reglemen indonesia yang telah diperbarui (RIB), Hal. 2.

Tugas dan kewenangan kepolisian di atas merupakan suatu pedoman bagi kepolisian dibidang lingkungan bermasyarakat pada umumnya dan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran-pelanggaran tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh kelompok supporter sepak bola di Gresik khususnya.

Dengan melihat realita yang ada bahwasannya kepolisian kurang tegas dalam menegakkan hukum dikalangan masyarakat awam yang membutuhkan bimbingan untuk mengetahui tentang pelanggaran-pelanggaran khususnya yang dilakukan oleh kalangan supporter sepak bola Gresik, dalam hal ini peran kepolisian sangatlah penting untuk mewujudkan suatu aturan agar dapat diterima dikalangan masyarakat khususnya supporter sepak bola di Greik.

³⁵ Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100 .